

JURNAL**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat****Atau Kaligarang Di Kota Semarang**

Oleh :

Nama : R. Harley Desmond D.P

NIM : 14010110120034

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

River Management Policy Implementation West Flood Canal or Kaligarang in Semarang

Management Policy Flood Canal River West / Kaligarang in Semarang is a policy made by the Government that the Government Regulation No. 38 of 2011 on the River Management Regulations as well as on River Management Cooperation. This policy is a policy that has the objective to cope with the flood and improve the local economy through events and destinations new tourist attractions in the form of water attractions (Riverpark) in Semarang.

This study is a qualitative study with the primary objective to describe the depth of the River Management Policy Implementation West Flood Canal / Kaligarang in Semarang. Data collection techniques in this study using in-depth interviews and documentation and analysis of documents. Analysis of the data in this study include stage data reduction, data presentation, and data verification or conclusion.

From the results of this study concluded that the Policy Management Flood Canal River West / Kaligarang in Semarang has not run optimally, with indications that implementation is not fully maximized because they stage socialization agencies / related local government offices in the preparation of the "Cooperation Agreement" West Flood Canal river management / Kaligarang, Security river by the individual assets or people around who use these assets to the negative things, the problem of hygiene, lack of coordination between the City Government and the Provincial Government.

It is necessary for the optimization of the Central Government to the Provincial Government and the City so that the policy can be run with the maximum, penyempurnaam phase of socialization among agencies / SKPDs concerned and especially in the community, the follow-up compilation "Cooperation Agreement" West Flood Canal river management / Kaligarang in the city, as well as segeranya followed up by the private sector to be managed as a tourist spot of water in order to improve the economy of the community, especially people of Semarang.

Keywords: Policy, River Management, Planning, Community Participation, Tourism (Travel Air).

A.PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Seringkali pemerintah tidak menghargai partisipasi masyarakat, dikarenakan lebih berorientasi pada kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat. Padahal masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, yaitu bahwa langkah konkrit untuk mewujudkan visi misi kota Semarang salah satunya dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam "SAPTA PROGRAM" yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan.

Proyek pengelolaan atau normalisasi sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang tersebut menjadi program utama Pemerintah untuk menampung curah hujan yang cukup tinggi. Setelah bertahun-tahun sampah menumpuk di sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang ini dan mengakibatkan pendangkalan sungai yang akhirnya menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Proyek pegelolaan atau normalisasi Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang merupakan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengelola air dengan baik, bahkan pengelolaan air sungai tersebut akan mendukung swasembada beras dan

kekuatan ketahanan pangan, karena mampu mengairi sejumlah lahan persawahan yang selama ini minim air. Karena air adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang merupakan program pembangunan strategis nasional yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dimana sepanjang kurang lebih 9,2 kilometer telah direstorasi sehingga kualitas sungai sangat baik dan dapat dijadikan obyek wisata baru yang menarik, bahkan dapat dipromosikan sebagai tempat pengelolaan sungai yang baik di Indonesia pada umumnya dan Kota Semarang khususnya. Proyek normalisasi sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang ini ternyata tidak hanya mengeruk sampah dan membersihkan sampah di sungai, akan tetapi juga rencananya akan dijadikan sebagai obyek wisata.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang “Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang?“, dan “Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang tersebut?”.

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang, serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang tersebut.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji pemahaman tentang implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang. Juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan yang bersifat operasional, perencanaan dan perancangan Sungai Kanal Banjir Barat Semarang yang representatif, untuk dapat menunjang operasional dan fungsional kawasan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori

yang cukup, antara lain Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, dan Kemitraan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjabarkan atau menganalisis, yang mana sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mendiskriptifkan /menggambarkan suatu keadaan (objek) yang didalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis.

B. PEMBAHASAN

B.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk menganalisis dan mengintrepetasi data ini terdiri dari uraian-uraian data mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang. Implementasi kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang meliputi beberapa aspek yaitu :

a. Komunikasi

Pada dasarnya merupakan kebijakan yang mendapat dukungan dan pandangan positif dari berbagai pihak. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang yang memang bertujuan terwujudnya Kanal Banjir Barat/ Kaligarang sebagai *city amenity* yang adalah termasuk sebagai fungsi pengendali banjir. Sedangkan kebijakan ini mempunyai tujuan untuk menormalkan kembali fungsi Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang agar menghasilkan kondisi yang aman dari ancaman bencana banjir dan rob dan sebagai destinasi wisata baru di Kota Semarang (*Riverpark*). Oleh karenanya kebijakan ini dinilai mempunyai manfaat positif sehingga berbagai pihak mendukung dan setuju akan adanya kebijakan ini.

Sejauh ini komunikasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal

Banjir Barat/Kaligarang di Kota Semarang ini memiliki nilai manfaat dan tujuannya sangat mulia, antara lain untuk menyelamatkan alam dari bencana alam seperti banjir dan rob di Kota Semarang, maka semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk stakeholder harus terlibat langsung, punya andil dan berpartisipasi mensukseskan kebijakan ini, karena dampak kebijakan ini dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh manusia. Dalam komunikasi yang dijalin telah diuraikan dengan jelas tentang tujuan dan manfaat dengan berpedoman PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta dalam Kesepakatan Bersama Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa tengah No. 610/275/2013 tentang Pengelolaan Kanal Banjir Barat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sangat mengikat kepada seluruh masyarakat dalam hal kerjasama dalam membantu akan kelestarian sungai tersebut.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang sangat perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya peduli terhadap lingkungan dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari menjaga kelestarian sungai. Sehingga dengan adanya sosialisasi Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mensukseskan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang yaitu adalah dari pihak Pemerintah (SNVT KBB BBWS Pemali Juana, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang), pihak Swast (kontraktor dari Waskita Karya, Brantas Abipraya dan Wijaya Karya *joint operation* dan konsultan Pengawas CTIE dan *associated*, serta JICA/LOAN), serta dari pihak masyarakat sebagai pihak yang mendapat manfaat dari normalisasi dan pihak yang turut mendukung kebijakan tersebut.

Sumber dana finansial dalam pelaksanaan program pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang disediakan oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, Dana pinjaman dari Pemerintahan Jepang (JICA/LOAN) yang mengangarkan dana untuk pelaksanaan program pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang.

Sumberdaya fasilitas pun tersedia guna untuk pemanfaatan sosialisasi masyarakat publik seperti tugu bendung kali Semarang, tanggul dan perkuatan tebing, senderan, lining wall, pagar, trotoar, lampu taman, shelter dan gebalan rumput, serta panggung terbuka.

c. Disposisi

Komitmen yang baik dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang yang mengatur Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/Kaligarang di Kota Semarang yaitu setelah PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai di berlakukan ketika itu juga Pemerintah Kota Semarang langsung melaksanakan sosialisasi kepada aparat Pemerintah SKPD terkait dan masyarakat. Komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/Kaligarang di Kota Semarang juga dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kota Semarang yaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknya dengan segala kekurangan dan rintangan yang ada. Adanya Kesepakatan Bersama Kementrian Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Semarang pun bertujuan agar program/ kebijakan tersebut terlaksana dengan lancar dan maksimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang terdiri dari berbagai instansi atau SKPD yang menangani dan struktur birokrasinya mengikuti struktur organisasi/ instansi tersebut. Selain itu, prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) menjadi pedoman para implementor menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam hal struktur birokrasi, program pengelolaan sungai Banjir Kanal Barat/ Kaligarang di Kota Semarang banyak yang belum terpenuhi, diantaranya tidak adanya standar operasional prosedur, dan mekanisme kerja yang kurang terbuka oleh masyarakat luas.

B.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya dalam hal sosialisasi kepada instansi atau SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang.
2. Kesepakatan Bersama Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa tengah No. 610/275/2013 tentang Pengelolaan Kanal Banjir Barat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang hingga saat ini belum terselesaikannya (Perjanjian Kerjasama) yang bekerjasama oleh instansi/ SKPD terkait, sehingga sosialisasi tidak maksimal dalam penyampaiannya kepada instansi dan aparat Pemerintah yang terlibat didalamnya.
3. Pelaksanaan sosialisasi kurang intensitas dan efektif.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang dalam proses sosialiasasi masih sangat perlu ditambah intensitasnya oleh Pemerintah Koata Semarang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang adalah telah terbentuknya Deklarasi Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah dan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan Sungai

Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang berkaitan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang dan uji publik yang terkait pada PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan untuk Pengelolaan atau Normalisasi Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa tengah No. 610/275/2013 tentang Pengelolaan Kanal Banjir Barat di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap masyarakat dengan cukup baik. Dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terlibat dalam suatu kebijakan akan membuat kebijakan berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan membuat kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tercipta koordinasi yang baik tidak hanya dengan instansi yang terlibat tetapi dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena saat ini Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang masih dalam tahap sosialisasi terhadap Instansi/ SKPD terkait dalam pembuatan atau penyusunan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang yang sampai saat ini masih berupa Kesepakatan Bersama Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang. Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang sudah disampaikan melalui rapat koordinasi antara pihak-pihak SKPD/ Instansi terkait, serta disetiap kesempatan yang ada.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang diantaranya sisi- sisi kelemahan dari koordinasi (stakeholder) Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Provinsi yang lemah, pengamanan aset sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang oleh oknum-oknum atau warga sekitar yang memanfaatkan aset tersebut (sebagai tempat tinggal,tempat pacaran,vandalisme,pembunuhan), masalah kebersihan (menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, tempat sampah tidak digunakan sesuai pada fungsinya,buang sampah sembarangan di sungai, dan lain- lain), kurangnya komunikasi terhadap masyarakat sehingga kurangnya partisipasi oleh masyarakat.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang di Kota Semarang diantaranya Koordinasi yang baik terhadap Pemerintah Pusat (solid dan lancar), Kementrian PU BBWS Pemali Juana disuport oleh Pemkot dan Pemprov, dari unsur masyarakat Kota Semarang mendukung untuk menjaga aset-aset yang sudah terdukung, pihak swasta (beberapakali responsif), event-event pariwisata, welcome, sinergi bersama, menjadikan satu ikon pariwisata baru/ andalan destinasi baru di Kota Semarang.

C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa dari pihak Kementerian PU Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kota Semarang, Dinas PSDA Povinsi Jawa Tengah, serta Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh instansi/ SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang sehingga pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang dapat berjalan secara maksimal, lalu pelaksanaan sosialisasi secara khusus tentang Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang dengan menunjuk atau membentuk tim sosiliasasi harus segera diberikan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang agar

masyarakat lebih mengetahui tentang adanya Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang serta pemberian dana sosialisasi kepada masyarakat agar sosialisasi lebih efektif dan efisien, segera ditindaklanjuti oleh pihak swasta untuk dikelola sebagai tempat wisata air (*riverpark*) guna agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Semarang dan sebagai destinasi wisata baru serta menarik di Kota Semarang, dan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang untuk lebih maksimal dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat Kota Semarang oleh Instansi/ SKPD-SKPD terkait. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga harus segera menerbitkan SOP (*standard operating procedures*) untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sungai Kanal Banjir Barat/ Kaligarang Kota Semarang sehingga seluruh instansi yang terlibat dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afifuddin Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Anna S. 2001. *Model Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu*, Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Asdak C. 2007. *Hidrologi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Penerbit PT Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi II. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Grindle, Merilee S. dan John W. Thomas.1991.*Public Choices and Policy Change The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: John Hopkins Univ. Press.
- HAW, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Inu Kencana, Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni. hlm.5
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES,. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik-Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*.

Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
Yogyakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peraturan Pengelolaan
Sungai serta tentang Kerjasama Pengelolaan Sungai

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Semarang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap tata
cara pelaksanaan penanganan bencana di wilayah Kota Semarang

Website :

<http://psdaesdm.semarangkota.go.id/>

<http://psda.jatengprov.go.id/>

<http://www.bbwspemalijuana.com/>